

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NO.16
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU
DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA H.MUHAMMAD HEFNI
TANJUNG MORAWA**

SKRIPSI

Oleh:

DESY RAHMAYANTI MARUNDURI
NPM : 1403100181

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **DESY RAHMAYANTI MARUNDURI**
N P M : 1403100181
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NO 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU AGAMA DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA H.MUHAMMAD HEFNI TANJUNG MORAWA**

Medan, 15 maret 2018

Pembimbing


DEDI AMRIKAL, S.Sos, M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

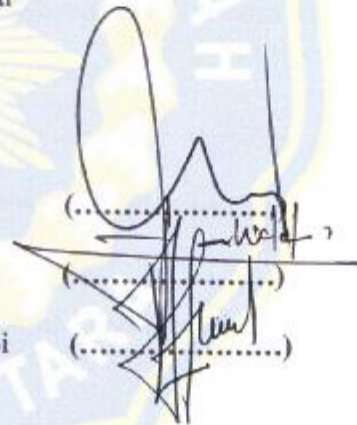
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DESY RAHMAYANTI MARUNDURI**
N P M : 1403100181
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **R. KUSNADI, Drs, M.AP**
PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP**
PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL S.Sos, M.Si**



PANITIA PENGUJI

Ketua,


Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,


Dr. ZULFAHMI, M.IKom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Desy Rahmayanti Marunduri NPM 1403100181 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Percabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 Maret 2018

Yang menyatakan



Desy Rahmayanti Marunduri



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Si Cepat dan Terpercaya
Kop surat ini agar disebutkan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : DEST FATHMAYANTI MARUDUFI
N P M : 1403100181
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NO.16 TAHUN 2016 TENTANG PENGELUARAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU AGAMA DI MASYARAKAT KEPERAWATAN SWASTA DI KABUPATEN MEDAN TANGUNG MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	12 Oktober 2017	Bimbingan Sudul skripsi dan Bab 1 Latar belakang masalah.	
2.	21 Desember 2017	Bimbingan perbaikan latar belakang, keseluruhan Bab 1	
3.	22 Desember 2017	Bimbingan proposal keseluruhan Bab 1 + Bab 3	
4.	28 Desember 2017	Bimbingan proposal, dan ace Bab 1 + Bab 3	
5.	05 Februari 2018	Perbaikan proposal	
6.	12 Februari 2018	Perbaikan latar belakang masalah dan bimbingan draft wawancara.	
7.	20 Februari 2018	Bimbingan draft wawancara dan ace untuk melanjutkan riset.	
8.	05 Maret 2018	Bimbingan skripsi secara keseluruhan dan beberapa perbaikan dari uraian teoritis.	
9.	07 Maret 2018	Bimbingan perbaikan skripsi keseluruhan.	
10.	08 Maret 2018	ace skripsi	

Medan, 08 MARET.....2018.....

Dekan,

(Drs. Pudiarto, M.Si)

Ketua Program Studi,

(Hesti Khatmayanti, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke : ...

(DEDI AMPLESI, S.SOS, M.Si)

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NO.16 TAHUN
2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU DI
MADRASAH IBTIDAIYYAH SWASTA H.MUHAMMAD HEFNI
TANJUNG MORAWA

OLEH:
DESY RAHMAYANTI MARUNDURI
NPM : 1403100181

Pengelolaan pendidikan agama merupakan mengatur berjalannya pendidikan agama di sekolah dan sebagai standar dan kewenangan Kementerian Agama yang harus dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan agama khususnya pada sekolah Madrasah ibtdaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa yang berbasis sekolah agama islam. Dalam Peraturan Kementerian Agama No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama. Pengelolaan pendidikan agama yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, tetapi masih ada kekurangan dalam menjalankannya yaitu dimana sekolah masih harus memberikan saran dan prasarana yang baik, masih adanya guru yang belum memiliki kualitas secara profesional dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pengelolaan pendidikan agama yang baik dari pihak sekolah MIS H.Muhammad Hefni dapat ditingkatkan lebih baik dan kinerja para pendidik dapat ditingkatkan dengan semaksimal mungkin.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan, proses perencanaan, serta pendidik.

Dalam pelaksanaan Peraturan Kementerian Agama No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama masih belum terimplementasikan dengan baik dan tujuan peraturan tersebut belum tercapai dalam hal meningkatkan profesionalitas guru di MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji Syukur penulis hantatkan kepada Allah Ta'ala, atas rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NO.16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA H.MUHAMMAD HEFNI TANJUNG MORAWA**

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor UMSU.
2. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku plt Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing atas segala bantuan dan dukungan moril (melebihi dukungan materil) yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan rizki-Nya kepada beliau.
4. Ibu Nalil Khairiyah S.IP, M.Pd selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta staf yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada ibu Khadijah, S.Ag selaku Ketua Yayasan MIS H.Muhammad Hefni terimakasih telah menerima baik ananda untuk melakukan penelitian.
7. Kepada ayahanda M Yusuf Marunduri dan ibunda Ahimsa Daely kedua orang tua yang cintanya tak terhingga untuk ananda dan sampai detik ini masih diberikan oleh Allah Ta'ala keberhakan dan kesehatan dalam memperjuangkan ananda hingga menyelesaikan kuliah.
8. Kepada abang dan kakak tercinta Rahmat Dhien Marunduri, Lailatul Fadhilah, Rizki Ramadhan, Fitriani Marunduri yang telah memberikan dorongan dan menyemangati dalam kehidupan sehari-hari, selalu memberikan nasehat yang terbaik untuk adiknya.

9. Kepada keponakan satu-satunya Arkan Albi Alif buah hati keluarga yang setiap pembuatan skripsi selalu diganggu dan dikerjain, salam sayang dari oncu.
10. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Cut Maghfirah, Nesya Kharisma, Retno Wulansari yang selalu menemani hari-hari di kuliah, dari awal semester 1 sampai akhir kalian selalu setia, segala doa yang terbaik untuk kalian.
11. Kepada akhwatifillah teman hijrah dan istiqomah yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih selalu mendoakan, dan menasehati dikala lalai, semoga kita bisa bertemu dijannahNya insyallaah.
12. Kepada teman-teman angkatan 2014 semuanya, baik IAN, IKO ataupun IKS Semoga kalian semua sehat dan tambah sukses selalu.

Penulis menyadari sepenuhnya, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan juga ke khilafan, baik dari penyajian dan isi penelitian. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala anugerah dan kekuatan yang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Semoga petunjuk dan berkah-Nya selalu dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya.

Penulis juga berharap skripsi ini berguna bagi pembaca. Atas saran dan kritikan, penulis mengucapkan terima kasih. Billahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullah wabarakatuh

Medan, 08 Maret 2018
Penulis,

Desy Rahmayanti Marunduri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Implementasi	8
1. Pengertian Implementasi	8
2. Pengertian Kebijakan	9
3. Pengertian Kebijakan Publik	10
4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	11
B. Profesionalitas Guru.....	12
1. Pengertian Profesionalitas	12
2. Pengertian Guru	13
3. Peran Dan Fungsi Guru	15
4. Pengertian Profesionalitas Guru	18
5. Syarat Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam	19

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Kerangka Konsep.....	23
C. Definisi Konsep	25
D. Kategorisasi	26
E. NaraSumber	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
I. Tujuan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian.....	29
BAB IV ANALISIS DATA	46
A. Penyajian Data.....	46
B. Analisis Data	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama diartikan sebagai usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama dalam bermasyarakat. Pendidikan agama sebagai ujung tombak proses pembentukan kriteria peserta didik menempati posisi yang sangat strategis. Namun demikian, berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam dunia pendidikan, semakin hari semakin meningkat. Pendidikan agama yang relevan, efektif dan efisien menjadi dambaan bagi setiap para pengelola pendidikan khususnya dibidang agama. Dengan semakin beratnya tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, maka pengelola pendidikan agama dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan kemampuan profesional mampu untuk mengelola pendidikan dan melahirkan generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, taat dan patuh kepada kedua orang tua, menghormati guru, cerdas, kreatif dan mandiri

Dalam berjalannya pendidikan agama, penting adanya proses pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Hal ini, menjadikan pendidikan agama tersebut dapat diterapkan secara baik di sekolah, membentuk kepribadian para siswa/siswi dengan baik. Maka pentingnya memberdayakan setiap komponen-komponen

seperti standar isi, standar kompetensi, standar lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan dalam pencapaian visi dan misi dalam sekolah, dan terpenting dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien diartikan bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan memotivasi serta menciptakan generasi-generasi yang berpendidikan sesuai dengan norma dan aturan yang telah diatur oleh agama.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan peraturan Kementerian Agama no.16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama yang meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, saran dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi. Dalam peraturan Menteri Agama ini, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Salah satu faktor terpenting dalam berjalannya pendidikan agama didukung oleh pendidik, sesuai dengan tugasnya seorang pendidik yang profesional melaksanakan tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Adapun syarat dalam peraturan tersebut, guru pendidikan agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. Dan

sehubungan dengan tugas utamanya, maka seorang guru profesional harus meningkatkan kompetensinya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah tugas terhadap diri sendiri, kompetensi sosial adalah berhubungan dengan kehidupan bersama-sama manusia untuk dapat bergaul dengan sesama manusia dituntut adanya kemampuan berinteraksi dan memenuhi berbagai persyaratan antara lain, saling tolong menolong, saling menghargai, saling tenggang rasa. Kompetensi kepemimpinan adalah mampu menjadi inovator, motivator, serta fasilitator dalam pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia dari bagian proses pembelajaran agama. Kompetensi profesional guru adalah kecakapan seorang guru dalam menyampaikan proses belajar mengajar sesuai dengan keahlian serta pola pikir keilmuan mendukung mata pelajaran pendidikan agama.

Dalam proses pendidikan agama disekolah peranan guru sangatlah penting. Guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada anak didik, sehingga anak didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut.

Peranan penting guru agama dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada peserta didik dalam menerapkan ilmu agama yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, Guru agama pun menjadi tonggak dalam keberhasilan sehingga menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah dan mampu menerapkan ilmu agama dalam kesehariannya. Dikarenakan guru agama menjadi figur dalam pendidikan agama, menjadi panutan yang setiap perkataan maupun perbuatannya akan menjadi contoh bagi anak-anak didiknya.

Dalam kenyataannya, masih terdapat di beberapa sekolah yang tidak memiliki guru profesional dibidang agama. Seperti yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa, masih terdapat guru agama yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa adalah sekolah yang berbasis agama, yang terdiri dari kepala yayasan, kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, dan staf pengajar sebanyak enam belas guru. Dari keseluruhan guru tersebut, masih ada guru yang belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Agama No 16 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat kenyataannya di lapangan seperti di sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa, masih terdapat guru agama yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Kementerian Agama No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah dalam Rangka Meningkatkan**

Profesionalitas Guru Agama Di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Agama di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Agama di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah sesuai diimplementasikan atau akan diimplementasikan apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak.

- b. Bertambahnya pengetahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis.
- c. Sebagai bahan masukan atau saran kepada sekolah agar sekolah dapat mengoptimalkan perannya sebagai pencipta sumber daya manusia yang mandiri di kemudian hari.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Profesionalitas, Pengertian Guru, Pengertian Profesionalitas Guru, Syarat Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008 : 140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Anggara (2014 : 232) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut Usman (2002 : 70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Susilo (2007 : 174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Wahab (2005 : 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari pengertian Implementasi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang tidak sekedar dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efisien.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Dye (2005 : 17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003 : 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Menurut Wahab (2005 : 135) kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Agustino (2008:7) kebijakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (2006 : 106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Wahab (2012 : 15) kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Menurut Solly (2007 : 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari defenisi Kebijakan Publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan mempunyai manfaat yang positif. Sebaliknya, apabila kebijakan tidak dijalankan dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidak efektif.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012 : 141) implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Winarno (2002 : 102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Tachjan (2006 : 25) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan admnistrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui

Menurut Mustopadidjaja (2002 : 112) impelentasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan atau pelaksanaan dalam sistem administrasi pada pemerintahan. Sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif apabila dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sekedar berupa impian belaka. Selain itu implementasi kebijakan publik menyangkut keseluruhan badan pengelola administrasi dan menyangkut jaringan-jaringan politik, sosial, ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

E. Profesionalitas Guru

1. Pengertian Profesionalitas

Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

Menurut Mudlofir (2012 : 5) profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.

Menurut Wirawan (2011 : 10) profesionalitas merupakan ide, aliran atau pendapat-pendapat bahwa suatu profesi harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu pada norma-norma profesionalitas.

Menurut Alma (2010 : 130) profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

Dari pengertian profesionalitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalitas merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian, kemampuan, ketrampilan, serta pendidikan yang dimiliki dengan bidang pekerjaannya serta sikap para anggota profesi benar-benar menguasai sungguh-sungguh pada profesinya.

2. Pengertian Guru

Menurut Jamaluddin (1987 : 1) guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmanidan rohaninya agar mencapai kedewasaanya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah dimuka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri.

Menurut Daradjat (1992 : 2) guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak para orangtua.

Menurut Djamarah dan Azwan Zain (2010:1) guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan.guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan.

Menurut Abdullah (2005 : 31) guru merupakan tugas lapangan dalam pendidikan yang selalu bergaul secara langsung dengan murid dan obyek pokok dalam pendidikan karena itu, seorang guru harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

Menurut Muhaimin (2004 : 217) guru atau pendidik memegang peran yang sangat sentral dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Guru dituntut

untuk mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar menjadi perilaku mengajar yang efektif dalam diri peserta didik. Di samping itu guru dituntut pula untuk mampu menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. Dan yang lebih penting lagi adalah guru harus mempunyai kepribadian karena guru menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi panutan teladan dengan kesulitan peserta didiknya.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa seseorang guru harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Seseorang pendidik harus memiliki kematangan profesionalitas, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan mencintai anak didiknya
- b) Seorang guru harus mempunyai diri yang stabil, yaitu kemampuan menjaga diri dari perbuatan terlarang
- c) Seorang guru harus mempunyai kematangan sosial yang stabil, yaitu berwibawa, sopan santun, penyabar sehingga mampu membina kerjasama yang efektif kepada peserta didik.
- d) Selain itu seorang guru juga harus mempunyai sifat-sifat pendidik sebagai berikut:
 - 1) Zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata.
 - 2) Kebersihan, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, berjiwa bersih dan terhindar dari sifat riya, dengki, dan lain lain.

- 3) Ikhlas dalam pekerjaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik kearah suksesnya tugas dan peserta didik.
- 4) Pemaaf, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap peserta didik.
- 5) Harus mengetahui tabiat dari peserta didik, yaitu mengetahui tabiat pembawaan, pemikiran peserta didik agar tidak salah dalam mendidik.

Dalam pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa Guru menjadi panutan dan teladan kepada para peserta didiknya, guru memikul tanggung jawab dari orangtua dalam mendidik anaknya dalam mewujudkan para peserta didik yang bertanggung jawab, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah yang taat serta memiliki kepribadian yang baik.

3. Peran dan Fungsi Guru

Menurut Zaini (2002 : 8-10) ada beberapa peranan fungsi guru, diantaranya ; (1) Guru sebagai pendidik, guru adalah pendidik,yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. (2) Guru sebagai pengajar, dalam hal ini guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami standar yang dipelajari.(3) Guru sebagai pembimbing, guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (guide), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanannya itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental,

emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan dengan jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.(4) Guru sebagai pelatih, proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih ditekankan lagi karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam berbagai ketrampilann yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.(5) Guru sebagai penasehat, guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik bahkan bagi orangtua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Banyak guru cenderung menganggap bahwa konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-akan berusaha mengatur kehidupan orang, dan oleh karenanya mereka tidak senang melakukan ini. Padahal menjadi guru ditingkat manapun berarti menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan, kegiatan pembelajaran pun meletakkannya pada posisi tersebut.(6) Guru sebagai model dan teladan, secara teoritis menjadi teladan merupakan bagian integral dari guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Memang setiap profesi mempunyai tuntutan-tuntutan khusus, dan karenanya bila menolak berarti

menolak profesi itu. Dalam beberapa hal memang benar bahwa guru harus bisa menjadi teladan, tetapi jangan sampai hal tersebut menjadikan guru tidak memiliki kebebasan sama sekali. Dalam batas-batas tertentu, sebagai manusia biasa tentu saja guru memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan.(7) Guru sebagai pendorong kreatifitas, kreativitas sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sikap universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreatifitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, dibimbing dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Guru sendiri adalah seorang kreator dan motivator, yang berada di pusat proses pendidikan.(8) Guru sebagai aktor, sebagai aktor guru berangkat dengan jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam yang akan mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun sang aktor berusaha mengurangi respon bosan dan berusaha meningkatkan minat para muridnya.(9) Guru sebagai emansipator, dengan kecerdikannya guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagasi kebudayaan. Ketika masyarakat membicarakan rasa tidak senang kepada peserta didik tertentu, guru harus mengenal kebutuhan peserta didik tersebut akan pengalaman, pengakuan dan dorongan.(10) Guru sebagai evaluator, evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang kompleks, karena melibatkan banyak

lata belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil kerja, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik.

4. Pengertian Profesionalitas Guru

Menurut Mudlofir (2012 : 5) Profesionalitas guru adalah gambaran atau keadaan derajat keprofesian setiap guru dalam menggapai sikap mental, pengetahuan, dan keahlian/ketrampilan yang dimiliki untuk melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran bidang studi secara optimal dan efisien.

Menurut Nurdin (2004:158) profesionalitas guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada anak didik, sehingga anak didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Fatah (2000 : 63) guru profesional adalah yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional yaitu :

- a) Mampu menguasai substansi mata pelajaran secara sistematis, khususnya materi pelajaran yang secara khusus diajarkannya.

- b) Memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan sehingga seorang guru dapat memilih materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik.
- c) Memiliki program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang diajarnya.

Dalam pengertian profesionalitas guru diatas,dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru adalah seperangkat fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus dibidang pekerjaannya dan mampu mengembangkan secara ilmiah disamping bidang profesinya serta memenuhi syarat menjadi profesionalitas guru.

5. Syarat Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Daradjat (1992:12) secara umum syarat profesionalitas guru sebagai pendidik dalam agama Islam adalah : (1) Sehat jasmani dan Rohani, Menurut Jamaluddin (2002 : 54) dalam sebuah kerja besar seperti pendidikan. Kondisi fisik kalau bukan yang terpenting adalah yang pertama yang harus diperhatikan. Hanya di atas pondasi kesehatan yang kuatlah ketajaman dan kehalusan intelek bisa dicapai.(2) Bertakwa, Takwa merupakan suatu bangunan tumpuan causa pendidikan. Oleh karena itu, kita tidak akan semena-mena berbuat zalim kepada anak didik dan sesama manusia, inilah konsekuensi seorang guru yang bertakwa. Dia selalu ingat bahwa Tuhan selalu mengawasi dirinya, sehingga dia akan selalu ingat Tuhan.(3) Berilmu Pengetahuan Luas, Kewajiban seorang guru memiliki ilmu serta berpengetahuan menjadi point penting dalam mengajar, mengingat setiap hari persoalan kehidupan kian bertambah. Maka konsekuensinya

adalah guru harus bertambah ilmu pengetahuannya. Guru sebagai komponen penting dalam pendidikan harus meningkatkan cakrawala berpikirnya dengan banyak membaca buku sebagai sumber ilmu pengetahuan.(4)Berlaku Adil, seorang guru wajib memiliki syarat sebagai guru yang adil baik kepada sesama manusia maupun anak didik. Karena, jika tidak berlaku secara adil mungkin saja akan terjadi kecemburuan diantara murid-murid tersebut, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap suatu proses belajar mengajar.(5)Berwibawa, kewibawaan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kewibawaan seperti itu, anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan. Guru yang memiliki syarat berwibawa dia akan takut dicerca orang, dan orang akan selalu takut dan malu untuk melecehkannya dan akan selalu menghormatinya. Implikasinya juga terhadap anak didik. Sehingga mereka merasa bahagia dan selalu merasa diarahkan oleh seorang guru yang mempunyai kewibawaan.(6) Ikhlas, Ikhlas artinya ketulusan hati dalam melaksanakan suatu amal yang baik. Hendaknya guru memiliki sifat yang ikhlas. Karena, kalau saja ikhlas ini hilang, dikuatirkan yang terjadi adalah sikap saling mendengki di antara para guru dan menghiraukan pendapat orang lain. Apabila, ikhlas tertanam dalam jiwa seorang guru, maka kemuliaan yang akan didapatkan seras ilmu yang selalu bermanfaat untuk anak didiknya.(7) Mempunyai Tujuan Rabbani, hendaknya seorang guru mempunyai tujuan Rabbani, dimana segala sesuatunya bersandar kepada Allah dan selalu menaatinya, mengabdikan kepadaNya. Jika guru telah mempunyai sifat Rabbani, maka dalam segala kegiatan pendidikan anak didiknya akan menjadi

Rabbani juga.(8) Mampu Merencanakan dan Melaksanakan Evaluasi Pendidikan, Syarat menjadi seorang guru salah satunya yaitu mampu untuk merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pendidikan. Hal ini dikarenakan, program evaluasi diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan materi, metode. Fasilitas, maupun dengan berbagai hal lainnya. Karena, jika tidak dilakukan maka hasil yang berkaitan tidak akan kelihatan dan juga tidak terencana sebagaimana yang diinginkan oleh guru tersebut.(9) Menguasai Bidang yang Ditekuni, Guru harus cakap dalam bidang ilmu yang dimilikinya, karena keprofesionalitas guru dinilai dengan bidang yang ia kuasai. Oleh karena itu, kewajiban dari seorang guru yakni selalu menekuni dan menambah ilmu pengetahuannya dalam bidang yang ia kuasai dan guru mampu mengajar anak didiknya dengan mata pelajaran sesuai dengan bidang studi yang ia miliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hat-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Kuswana (2011 : 43) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, yaitu peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi data dideskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni, ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

B. Kerangka Konsep

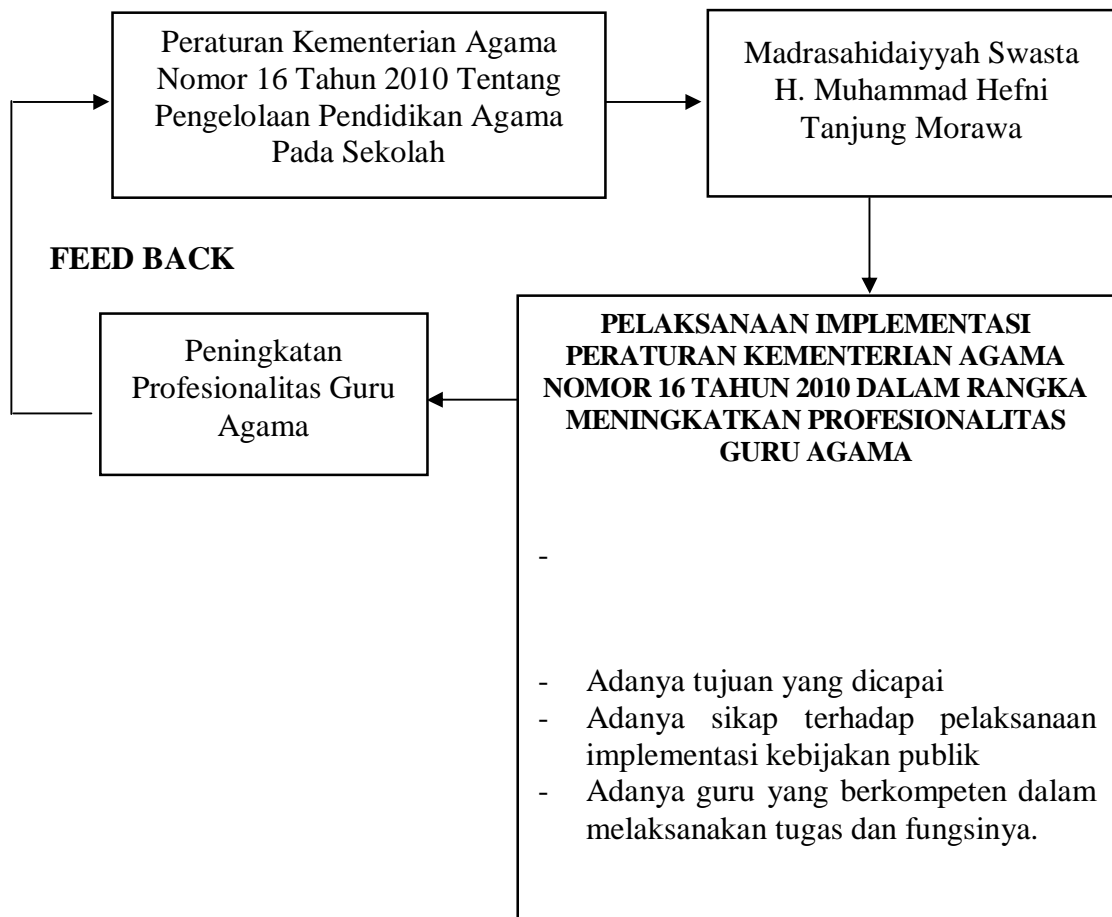
Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskna secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Konsep merupakan abstraksi yang akan terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel, jadi variabel adalah simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep.

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan.

Berikut gambar kerangka konsep yang digunakan di dalam penelitian ini :

Gambar 3.1
Kerangka Konsep
Implementasi Peraturan Kementerian Agama No.16 Tahun 2010



C. Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunaka untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Nawawi (1992:12) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang diteliti.

1. Implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang tidak sekedar dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efesien.
2. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.
3. kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan mempunyai manfaat yang positif. Sebaliknya, apabila kebijakan tidak dijalankan dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidak efektif.

4. Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan atau pelaksanaan dalam sistem administrasi pada pemerintahan. Sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif apabila dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sekedar berupa impian belaka. Selain itu implementasi kebijakan publik menyangkut keseluruhan badan pengelola administrasi dan menyangkut jaringan-jaringan politik, sosial, ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.
5. Guru merupakan panutan dan teladan kepada para peserta didiknya, guru memikul tanggung jawab dari orangtua dalam mendidik anaknya dalam mewujudkan para peserta didik yang bertanggung jawab, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah yang taat serta memiliki kepribadian yang baik.
6. Profesionalitas guru adalah seperangkat fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus dibidang pekerjaannya dan mampu mengembangkan secara ilmiah disamping bidang profesinya serta memenuhi syarat menjadi profesionalitas guru.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut :

1. Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

2. Adanya tujuan yang dicapai
3. Adanya sikap terhadap pelaksanaan implemementasi kebijakan publik
4. Adanya guru yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan

E. Nara Sumber

1. Kepala Yayasan MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa
Nama : Khadijah S.Ag
Umur : 41 Tahun
2. Kepala Sekolah MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa
Nama : Rahmalahayati S.Pd.I
Umur : 33 Tahun
3. Komite MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa
Nama : Zulkifli
Umur : 39 Tahun
4. Guru MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa
Nama : Diana Maya Sari,S.Pd
Umur : 33 Tahun
5. Guru MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa
Nama : Rahmah,S.Pdi
Umur : 31 Tahun
6. Guru MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa
Nama : Fitri Maria
Umur : 22 Tahun

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara. Menurut Ali (1997:152), wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan situs internet yang dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka data selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa tepatnya di JL.Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu Penelitian dimulai bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018

I. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

latar belakang berdirinya Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa adalah untuk mendirikan yayasan pendidikan agama islam untuk mewujudkan generasi penerus yang berakhlak mulia sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad. Karena tanpa dibekali dengan pengetahuan agama yang baik maka anak-anak kita dapat terjerumus pada tindakan yang tidak terpuji. Pendidikan agama islam sangat perlu ditanamkan pada saat anak masih

usia dini agar menjadi pegangan hidupnya untuk menjalani hidup hingga dewasa. Atas dasar tersebut Hj. Sa'diah mendirikan Yayasan Pendidikan H.Muhammad Hefni.

Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni didirikan pada tanggal 14 juni 1998 yang bertempat di jalan Batang Kuis Pasar III Desa Dalu X-A. Kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan di rumah Bapak H.Muhammad Hefni orang tua dari Hj. Sa'diah sebaagai pendiri TK/RA H.M Hefni. Dikarenakan kegiatan belajar dan mengajar awalya menumpang rumah orang tua dari Hj. Sa'diiah, maka diberi nama sesuai dengan nama orang tua beliau. Seiring berjalannya keagiatan belajar dan mengajar di RA H.M Hefni selama 2 tahun lalu Ibu Hj. Sai'diah membukan untuk tingkat MI dan MDTA sekaligus mengutus izin operasionalnya pada tahun 2000.

Tahun ketahun yayasan H.M Hefini makin berkembang dan memiliki lebih kurang 210 siswa baik darri tingkat RA, MI, TPA dan MDTA, maka tidak memungkinkan terus mengadakan kegiatan belajar dan mengajar di tempat tersebut. Oleh sebab itu pihak yayasan berinisiatif untuk mengurus pinjam pakai tanah di lahan PTPN II bertempat di jalan Batang Kuis Pasar III Desa Dalu X-A, berkat kerjasama dan kegiatan dari pihak yayasan dan masyarakat lingkungan di lingkungan Madrasah akhirnya keluarlah Surat Izin Pinjam Pakai Lahan No:11.TM/SP/01-A/II/2006. Tanggal 02 Februari 2006.

Pada tahun 2006 dibangun 4 lokal diatas lahan PTPN II seluas 2.000 m yang dananya berasal dari infak ibu Hj. Sa'diah dan bangunan tersebut diresmikan oleh Kakandepag Deli Serdang yaitu Drs. Abdul Rahim, M.Hum, dan pada tahun

2007 sampai dengan 2009 kembali dibangun beberapa lokal yang dananya berasal dari wakaf Bupati Deli Serdang Bapak Amri Tambunan dan infak wali murid dan tokoh masyarakat serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian pada tahun 2013 ibu Hj. Sa'diah meminjam uang dari Bank BRI Unit Simoang Kayu Besar Tanjung Morawa sampai saat ini sudah memiliki 11 ruang belajar, 1 bangunan musholla, 1 kantor, 1 ruang Lab komputer dan 4 kamar mandi.

J. Visi Misi dan Tujuan Sekolah

VISI

Unggul dalam prestasi, terampil dalam berkreasi yang berdasarkan IMTAQ dan IPTEK.

MISI

1. Membina kebersamaan antar guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memajukan pendidikan Madrasah.
2. Melaksanakan proses pendidikan yang dinamis, kreatif dan inovatif berdasarkan syariat islam dan Undang-Undang yang berlaku.
3. Membentuk manusia yang mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani.
4. Membentuk manusia yang berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan tanggung jawab.
5. Memotivasi dan membantu serta menumbuhkan semangat keunggulan setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal kepada seluruh masyarakat.

K. Bagan Struktur Organisasi Sekolah

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi yang merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa ini menetapkan struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertical. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

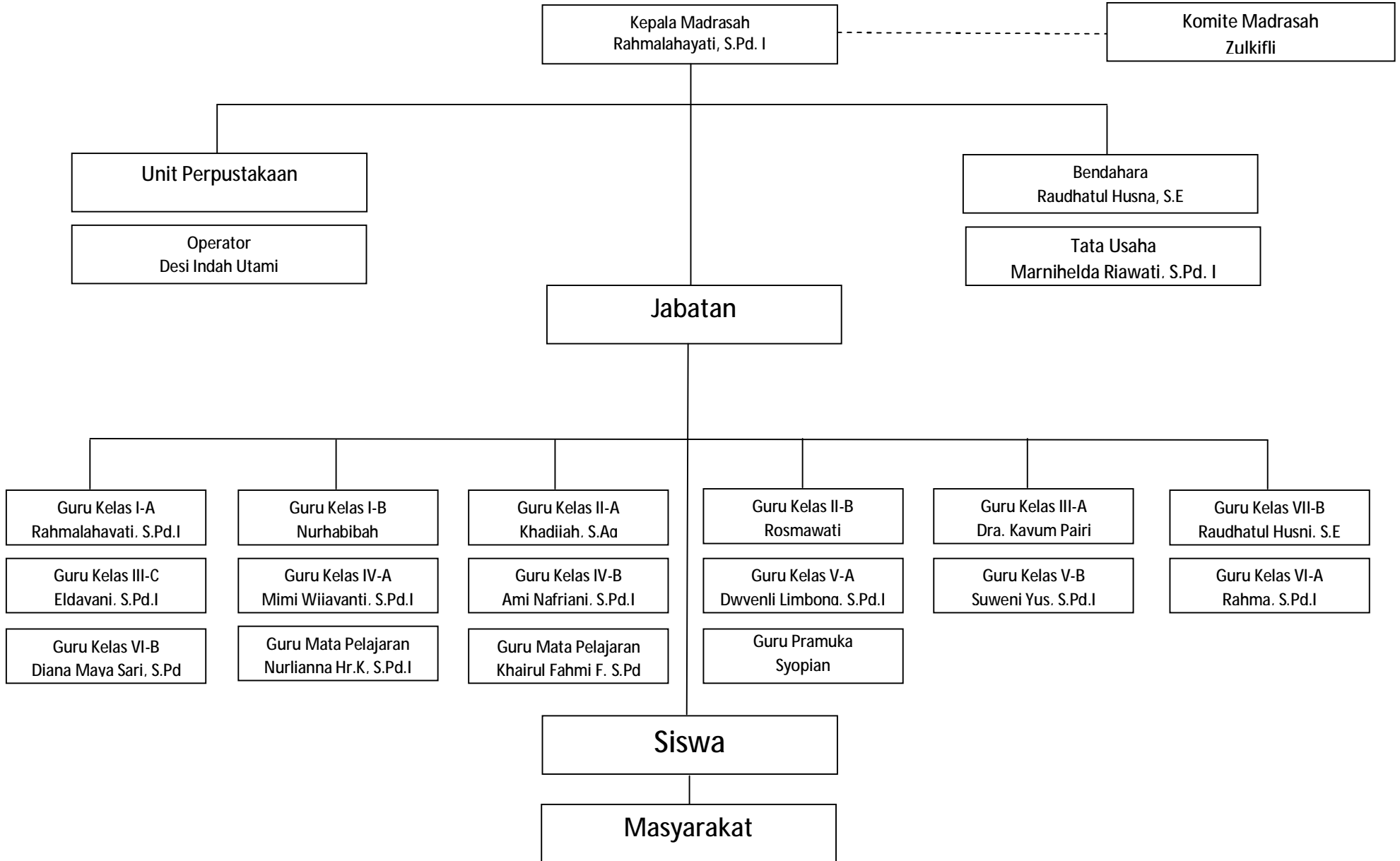
Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingatkan pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik ada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dengan fungsinya maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur organisasi tersebut yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH IBTIDAIYAH



1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah juga harus mengacu pada Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi: (1) Perencanaan rogram, (2) Pelaksanaan rencana kerja, (3) Pengawasan dan Evaluasi, (4) Kepemimpinan Sekolah, (5) Sistem informasi sekolah.

Berdasarkan Permendiknas NO.28 Tahun 2010 tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah, pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kerja kepala sekolah meliputi :

- a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah.
- b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan stadar pendidikam selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan,dan
- c. Usaha pengembangan profesional sebagai kepala sekolah.

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah :

- a) Perencanaan Program, meliputi :
 - Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah
 - Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah
 - Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah
 - Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - Membuat perencanaan program induksi
- b) Pelaksanaan Rencana Kerja, meliputi :
 - Menyusun pedoman kerja

- Menyusun struktur organisasi sekolah
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kerja sekolah persemester dan tahunan
 - Menyusun pengelolaan kesiswaan meliputi : melaksanakan penerimaan siswa baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler untuk para peserta didik, melakukan pelacakan kepada alumni.
 - Menyusun KTSP, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran.
 - Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan.
 - Mengelola sarana dan prasarana.
 - Membimbing guru pemula.
 - Mengelola keuangan dan pembiayaan
 - Mengelola budaya dan lingkungan sekolah
 - Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah
 - Melaksanakan program induksi
- c) Supervisi dan Evaluasi, meliputi sebagai berikut :
- Melaksanakan program supervisi
 - Melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
 - Melaksanakan evaluasi dan pengembangan KTSP
 - Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah
- d) Kepemimpinan Sekolah, meliputi sebagai berikut :
- Menjabarkan visi kedalam misi target mutu
 - Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai

- Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah
- Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu
- Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah
- Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat
- Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik
- Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik
- Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum
- Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah
- Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya
- Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah
- Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tunggal kependidikan

- Menjamin manajemen organisasi dan pengoprasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif
 - Menjalinkan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat
 - Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab
 - Mendelegasi sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya
 - Merencanakan pelaksanaan program induksi guru pemuda di sekolah, dsb
- e) Sistem informasi sekolah
- Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, rasa tanggung jawab, bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan tinggi
 - Melakukan penataan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja
 - Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain
 - Didukung oleh penerapan TIK dalam manajemen sekolah

- Didukung oleh kepemimpinan manajerial yang kuat, dan memiliki tingkat suistansibilitas tinggi
- Penguat eksistensi lembaga dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama sehingga sekolah memperoleh dukungan secara maksimal
- Meminimalkan masalah yang timbul di sekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah
- Menguatkan input sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas perangkat keras dan lunak manajemen sekolah agar implementasi sistem informasi manajemen berbasis TIK lebih efektif

L. Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah

a) Tujuan Dasar Pembentukan Komite Sekolah

Menjadi penghubung antar pihak sekolah dan orang tua siswa, tentang seluruh permasalahan dan informasi yang berkaitan dengan sekolah

b) Fungsi utama komite sekolah :

- Pengawasan terhadap jalannya kegiatan sekolah baik secara administrasi maupun keuangan
- Penghubung yang baik antar pihak sekolah dan pihak orang tua siswa
- Pendukung setiap kegiatan sekolah yang membutuhkan bantuan baik secara moril maupun materil

c) Komite sekolah secara organisasi adalah :

- Dibentuk disatuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan

- Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang peran dan fungsi
- d) Maksud pembentukan komite sekolah adalah :
- Agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan
 - Komite sekoah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaaanyang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif
- e) Komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada :
- Pengguna (*elient model*)
 - Berbagi kewenangan (*power sharing advocacy model*)
 - Kemitraan (*partnership model*)
 - Difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan
- f) Tujuan Pembentukan Komite Sekolah :
- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan oprasional dan program pendidikan disatuan pendidikan
 - Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyrakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

- Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

g) Peran Komite Sekolah

- Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
- Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*)
- Sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*)
- Sebagai mediator

h) Fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut :

- Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri dan pemerintah) berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu
- Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - kebijakan dan program pendidikan
 - rencana pengembangan sekolah
 - rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah
 - kriteria kinerja satuan pendidikan
 - kriteria tenaga kependidikan

- kriteria fasilitas pendidikan
- hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan
- menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan di satuan pendidikan
- melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

M. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Guru sebagai sosok teladan, sosok yang dipuji dan ditiru. Sudah sewajarnya jika selalu ingat akan tugas pokok dan fungsi sebagai guru, dengan demikian ketika seorang guru senantiasa memperhatikan mengingat dan menjalankan apa yang menjadi tupoksinya maka ia berhak menyandang gelar guru profesional. Berkaitan dengan lembaga pendidikan di sekolah, ada tiga tugas pokok guru dalam pendidikan, yaitu :

- Mengajar, mengajar mengandung arti dangkal yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa, mentransfer sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa sesuai disiplin ilmu yang diajarkan. Sasaran tugas ini adalah aspek kognitif siswa untuk melaksanakan hal ini diperlukan strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai.
- Mendidik, mendidik termasuk tugas guru yang komplis dan rumit. Tugas ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang baik, bagaimana

mengubah sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Dalam satu kelas diisi oleh siswa dengan berbagai karakter dan tingkah laku. Aneka karakter yang dimiliki oleh siswa akan dikembangkan dan diarahkan kepada karakter dan tingkah laku yang lebih baik.

- Melatih, tugas guru melatih siswa tidak sama dengan seorang pelatih lainnya. Tugas guru ini sejalan dan bersifat sinergis. Saat mengajar dan mendidik, maka saat itu pula dapat dilaksanakan tugas guru sebagai pelatih, melatih dengan berbagai kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik.

Adapun tugas dan fungsi guru adalah sebagai berikut :

1. Membuat program pengajaran
2. Menganalisa materi pelajaran
3. Membuat lembar kerja siswa
4. Membuat program harian jurnal belajar
5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
6. Melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian, tengah semester dan akhir semester
7. Melaksanakan analisis ulangan, program remedial, pengayaan
8. Mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport
9. Melaksanakan bimbingan konseling
10. Melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor apabila telah mengikuti pelatihan
11. Membuat alat bantu, membuat alat peraga

12. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
13. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
14. Membuat catatan tentang kemajuan peserta didik
15. Meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung
16. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
17. Menumbuhkan sikap menghargai seni
18. Mengikuti kegiatan kurikulum
19. Mengadakan penelitian tindakan kerja
20. Mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat

N. Siswa

Dunia pendidikan adalah sebuah sistem yang kompleks dan memiliki banyak unsur yang harus ada didalamnya. Salah satu unsur yang paling penting peserta didik dan juga menjadi subyek utama pendidikan. Secara sederhana peserta didik adalah seorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang dilakukan belajar. Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang dapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seseorang individu yang tengah mengalami perkembangan tertentu peserta didik masih banyak membutuhkan bantuan bimbingan dan arahan menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang masih balita seorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang tua ataupun saudara yang lebih tua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan barang mentah (*raw material*) yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. berdasarkan hal tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, lingkungan, keluarga dan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dan yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Yayasan MIS H.Muhammad Hefni, Kepala Sekolah MIS H.Muhammad Hefni, Kepala Komite MIS H.Muhammad Hefni, Guru pengajar MIS H.Muhammad Hefni.

1. Keadaan Fisik/Gambaran Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Data tentang keadaan fisik gambaran Di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa dikelompokkan dalam fasilitas sekolah, status sekolah, sarana sekolah, ketenagaan sekolah, dan data siswa, dan data guru.

Adapun keadaan fisik gambaran di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa terkait dengan fasilitas sekolah antara lain:

TABEL 4.1
Fasilitas Sekolah yang ada di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta
H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Fasilitas Sekolah	Jumlah
Ruang Kelas Belajar	1
Lab Komputer	1
Ruang Guru	1
Kantor Kepala Sekolah	1
Koperasi dan Kantin	1
Mushollah	1
Kamar mandi	4

Sumber : Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Adapun keadaan fisik/gambaran di MIS H.Muhammad Hefni berdasrkan sarana sekolah yakni :

Tabel 4.2
Keadaan Sarana Sekolah Madrasah Ibbtdaiyyah Swasta
H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Sarana Sekolah	Jumlah
Laptop/Notebook	2
Komputer kantor	2
Televisi	1
Dvd player	1
Pengeras suara	1
Komputer labor	5

Sumber : Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Adapun data siswa yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa berdasarkan kelas dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.3
Data siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin

Keadaan Kelas Siswa	TP. 2017/2018			
	Jumlah Rombel	Lk	Pr	Jumlah
Kelas I	2	27	27	54
Kelas II	2	30	34	64
Kelas III	3	34	39	73
Kelas IV	2	31	27	58
Kelas V	2	25	26	51
Kelas VI	2	28	32	60
Jumlah	13	175	185	360

Sumber : Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Adapun pihak pengajar yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa berdasarkan golongan, yaitu :

Tabel 4.4
Pihak pengajar/ketenagaan sekolah menurut golongan di Madrasah
Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Tenaga Admnistrasi Non PNS	2
Guru PNS	1
Guru Non PNS	16
Guru Honorer	5

Sumber : Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

2. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek sebagai berikut :

a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 01 maret 2018 pukul 09.00 dengan Khadijah, S.Ag selaku kepala yayasan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa dalam kaitannya dengan mengetahui bahwa adanya peraturan Kementrian Agama NO.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama, beliau menyampaikan bahwasanya pihak sekolah sangat mengetahui akan peraturan tersebut, pihak Kementrian Agama turut serta dalam berjalannya Madrasah tersebut. Kemudian cara pihak sekolah dalam menyampaikan tentang peraturan tersebut kepada para guru dengan diadakannya rapat yang hampir setiap bulannya diadakan. Dan dalam hal peraturan tersebut pihak sekolah juga memiliki peraturan selain dari Kementrian agama dalam meningkatkan profesionalitas guru.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 01 Maret 2018 pada pukul 11.00 dengan Ibu Rahmalahayati, S.Pd selaku kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa dalam kaitannya dengan mengetahui adanya peraturan tersebut beliau mengatakan bahwasanya sekolah mengetahui dan mempergunakan Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan agama dikarenakan sekolah berbasis agama maka pentingnya peran pihak Departemen Agama dalam menjalankannya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya peraturan tersebut telah disampaikan kepada guru-guru dan pihak sekolah lainnya dalam rapat yang biasanya diadakan sebulan sekali dalam berlangsungnya sekolah. Pihak sekolah juga memiliki pedoman peraturan lain dalam menjalankan sekolah seperti Undang-Undang yang mengatur guru dan standar mutu kualitas sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat 02 Maret 2018 pada pukul 11.00 WIB dengan Bapak Zulkifli selaku ketua Komite Sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Dalam kaitannya dengan adanya Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama bahwasanya beliau mengetahui adanya peraturan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudian, dengan adanya peraturan tersebut beliau juga mengatakan bahwa pihak sekolah sudah melaksanakannya akan tetapi masih banyak kendala yang dialami oleh pihak sekolah sendiri. Dengan adanya peraturan tersebut beliau juga mengatakan sejauh ini pihak sekolah berusaha untuk mengacu dalam peraturan Kementrian Agama dalam menjalankan proses belajar-mengajar serta pengelolaan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Diana Maya Sari,S.Pd selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Bahwasanya beliau mengetahui adanya peraturan tersebut, yang mana peraturan Kementrian Agama dijalankan oleh pihak sekolah akan tetapi belum maksimal dalam menjalankannya.Menurut beliau peraturan ini sangat bagus dalam pengelolaan pendidikan agama. Pihak sekolah pun berupaya dalam menjalankan pengelolaan pendidikan agama dalam meningkatkan kualitas guru dengan banyak memberikan motivasi-motivasi,dsb.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Rahmah,S.Pdi selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Dalam kaitannya beliau mengetahui bahwa adanya peraturan Kementrian Agama tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakan dan secara umum telah diketahui oleh pihak sekolah melalui rapat-rapat yang diadakan oleh kepala sekolah dan kepala sendiri. Dan pihak sekolah berusaha dalam menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Fitri Maria selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Dalam kaitannya beliau belum sepenuhnya mengetahui adanya peraturan tersebut yang mengatur akan pengelolaan pendidikan agama. Akan tetapi pernah mendengar ketika rapat yang diadakan oleh para guru. Dan proses yang dijalankan oleh pihak sekolah, sekolah berupaya akan tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh sekolah

b. Adanya tujuan yang dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2018 pada pukul 09.00 wib dengan ibu Khadijah,S.Ag selaku ketua yayasan di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa

Dalam hal ini, tujuan daripada peraturan tersebut telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan adanya usaha dari para pihak sekolah dan kerja sama antar para guru dalam meningkatkan kualitas dan profesional para guru. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalitas guru salah satunya yaitu, guru yang berada di madrasah diwajibkan untuk setiap orangnya membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) guna memberikan target pengajaran apa saja yang telah dilakukan dan pencapaian seperti apa yang telah diraih dalam meningkatkan proses-belajar mengajar kepada siswa/siswi. Hal ini, berlaku kepada setiap guru baik yang telah PNS, sertifikasi, maupun guru yang belum meraih keduanya. Dan,apabila para guru belum menyanggupi dalam hal pencapaian RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah dibuatnya selama setengah semester atau 6 bulan proses belajar-mengajar maka guru tersebut diberikan sanksi sebagaimana pengurangan gaji kepada guru yang mendapatkan sanksi tersebut. Sebagaimana pelaksanaan dalam usaha meningkatkan profesionalitas guru tentu adanya kendala-kendala yang dialami yang tidak sesuai dengan adanya tujuan peraturan Kementrian Agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2018 pada pukul 11.00 wib dengan ibu Rahmalahayti,S.Pdi selaku kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Tujuan

dari adanya peraturan tersebut berjalan dengan baik pada pengelolaan pendidikan agama dalam meningkatkan profesionalitas guru di sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankannya salah satunya dengan menghadirkan setiap tahunnya guru-guru yang berkompeten dalam bidang dan sarjananya serta memberikan pelatihan kepada guru di dalam maupun di luar sekolah dan mengadakan RPP yang dijalankan wajib dari guru pengajar di madrasah. Serta dalam berjalannya sekolah ada banyak yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan pendidikan agama. Dikarenakan fasilitas yang masih kurang, kualitas guru yang masih banyak terkendala mulai dari pendidikan dan pengalaman mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 11.00 wib dengan bapak zulkifli selaku ketua komite di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Dalam kaitannya mengenai tujuan daripada peraturan Kementrian Agama tersebut beliau masih belum terlalu banyak mengetahui seberapa keberhasilan yang diraih oleh pihak sekolah. Akan tetapi, beliau melihat dari sisi lain dalam pengelolaan pendidikan tersebut yang dirasakan bahwa pihak sekolah telah berusaha mungkin dalam melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Dan, berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah khususnya untuk meningkatkan profesionalitas guru dirasakan sudah semaksimal mungkin. Akan tetapi, banyaknya kendala yang dialami sehingga adanya beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas guru-guru yang mengajar di MIS H.Muhammmad Hefni.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Diana Maya Sari,S.Pd selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni. Dalam proses pelaksanaan implementasi di madrasah pihak sekolah berupaya untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Selaku guru yang mengajar di madrasah beliau dalam menjalankan ketentuan tersebut dengan peraturan yang telah ditetapkan dan pihak sekolah pun membantu pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kualitas profesional guru. Dan masih banyak kendala yang dialami mulai dari saran dan prasarana sekolah, dari pihak sekolah sendiri, dan dari guru sendiri dengan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Rahmah,S.Pdi selaku guru pegajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Dalam kaitannya dengan tujuan pelaksanaan implementasi kebijakan Kementrian Agama sejauh ini pihak sekolah telah melaksanakan dengan baik. Hal ini, diikuti dengan adanya perkembangan kepada siswa serta kualitas para guru di dalamnya. Dalam menjalankan kebijakan khususnya menngkatkan profesionalitas guru, para guru dianjurkan untuk menaati peraturan yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan dalam meningkatkan profesionalitas guru masih banyak kendala yang dirasakan oleh guru sendiri pada saat proses belajar-mengajar seperti kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Fitri Maria selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Sejauh ini pihak sekolah berupaya dalam menajalankan proses pelaksanaan belajar-mengajar dengan baik disertai dengan banyaknya kendala yang dihadapi. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut selaku guru yang mengajar disekolah beliau berupaya memberikan yang terbaik dalam apa yang disampaikan kepada para siswa/siswi di madrasah. Berjalannya proses belajar-mengajar tentunya banyak kendala yang dialami mulai dari prasarana yang masih belum memadai, dan pengajar sendiri belum sesuai dengan target yang ditentukan.

c. Adanya sikap terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2018 pada pukul 09.00 wib dengan ibu Khadijah, S.Ag selaku ketua yayasan di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. dalam kaitannya dengan pelaksanaan bahwa sekolah secara prosedural mengikuti kurikulum yang diberikan pemerintah dalam pembelajaran, beliau para guru yang mengajar melaksanakannya dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah dibuat dan pihak sekolah, kemudian mendorong para guru yang mampu atau belum mampu untuk keikut sertaan dalam sertifikasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya akan tetapi menjadikan guru yang profesional dinilai kemampuan guru tersebut dala melakukan tugas pokoknya meliputi kemampuan, merencanakan, melakukan, serta mengevaluasi pembelajaran. Untuk

hal itu, pengembangan diri kepada guru perlu ditingkatkan lebih baik. Adapun guru yang belum memenuhi syarat dari peraturan Kementerian Agama tersebut kami bina proses belajar-mengajar yang beliau terapkan dalam kelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2018 pada pukul 11.00 wib dengan ibu Rahmalahati, S.Pd selaku kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta H.Muhammad Hefni. Senada dengan yang disampaikan oleh ketua yayasan, bahwasanya langkah yang diambil dalam meningkatkan profesionalitas guru yaitu dengan adanya RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang dilaksanakan oleh masing-masing guru dengan adanya RPP tersebut para guru bersaing dalam pengembangan anak didiknya, serta melaksanakan pembelajaran dengan baik dalam ruang kelas. Sebagaimana usaha yang dilakukan pihak sekolah memberikan motivasi serta pengambilan tindakan bagi para guru yang belum dapat melaksanakan RPP dengan baik diberikan pemotongan iuran gaji setiap 6 bulan sekali. Hal ini, memotivasi para guru berlomba-lomba dalam melaksanakan RPP yang telah dibuatnya. Berbagai tindakan diupayakan dalam menilai guru yang belum memenuhi syarat, pihak sekolah berupauaya memebrikan motivasi kepada guru tersbut. Dan guru tersebut, dianjurkan untuk menempuh pendidikan S1 demi meningkatkan profesioanlitas guru dan untuk memenuhi syarat guru sebagaimana petaturan Kementerian Agama No.16 Tahun 2010 tentan gpengelolaan pendidikan agama.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 11.00 wib dengan bapak zulkifli selaku komite sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan, sejauh ini

langkah dari pihak sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru baik, seperti pengontrolan sistem belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada guru, memotivasi anak didiknya. Dan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah memotivasi para guru dalam belajar-mengajar, sebagai evaluator dan mediator serta sebagai orang tua murid memberikan semangat kepada anak didik, dan memberikan pendidikan akhlak mulia dengan anak agar dapat mendukung para pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Diana Maya Sari,S.Pd selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasata H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan usaha dalam mendidik siswa/siswi yang berada disekolah dengan memberikan tauladan yang baik kepada mereka, berdisiplin dalam belajar-mengajar, dsb. Dalam hal peningkatan kualitas menjadi guru yang profesional beliau sendiri mengikuti sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang wajib dibuat serta dilaksanakan oleh guru yang mengajar. Dan sikap dari pihak sekolah kepada para guru memberikan motivasi dalam pengajarannya dan pihak sekolah memberikan kemudahan kepada guru untuk melaksanakan proses belajar-mengajar yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Rahmah,S.Pdi selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasata H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan usaha dalam mendidik para siswa/siswi dengan menjadi guru yang baik, berakhlakul karimah, dan selalu memberikan motivasi belajar kepada anak

didik sehingga mereka menjadi anak didik yang bermanfaat bagi masyarakat. Sejauh ini, usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas menjadi guru yaitu dengan menjalankan peraturan sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Dan juga, pihak sekolah memberikan motivasi kepada guru, agar guru lebih semangat dalam proses belajar-mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Fitri Maria Selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasata H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan usaha menjadi guru yang berkualitas tentu tidaklah mudah diikuti dengan pengalaman yang belum lama dalam proses belajar mengajar tentu sangat berpengaruh kepada siswa/siswi, dan usaha dalam mendidik para peserta didik dengan memberikan tauladan yang baik kepada mereka, memberikan motivasi dalam belajar, dan menjadikan mereka anak-anak yang berakhlakul karimah, sebagai guru yang baik tentunya dengan mengikuti peraturan yang diberikan oleh sekolah maupun peraturan dari pemerintah. Dan sikap dari pihak sekolah sendiri dalam hal peningkatan kualitas guru dinilai baik dan pihak sekolah memotivasi para guru untuk bersaing memberikan yang terbaik bagi sekolah maupun peserta didiknya.

d. Adanya guru yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2018 pada pukul 09.00 wib dengan ibu Khadijah, S.Ag selaku ketua yayasan di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau

mengatakan sesuai RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dalam penilaiannya apabila seorang guru telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuatnya pihak sekolah melakukan penilaian kinerja guru, pihak sekolah menilai akhir kinerja yang dihasilkan kemudian menjadi kategori penilaian dan digunakan untuk menentukan persentase kualitas seorang guru yang mengajar. Beliau juga mengatakan sejauh ini para guru yang berada di sekolah berupaya dalam menjalankan peran dan fungsinya, mengajar dengan baik, memberikan tauladan yang baik kepada peserta didiknya, serta memberikan motivasi belajar. Dan banyaknya kendala dan hambatan masih adanya sarana dan prasarana yang kurang, lemahnya dalam faktor keuangan sekolah, dsb.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 maret 2018 pada pukul 11.00 wib dengan ibu Rahmalahayati, S.Pd selaku kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan cara pihak sekolah menilai guru profesional yakni dengan bagaimana tahapan yang baik dalam belajar-mengajar yang beliau sampaikan kepada anak didiknya, pelaksanaan belajar mengajar sesuai dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), adanya guru yang bersertifikasi. Sejalan ini, pihak sekolah menilai guru yang mengajar berusaha untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru. Dalam proses-belajar tentu adanya berbagai hambatan dan kendala salah satunya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 11.00 wib dengan bapak zulkifli selaku komite sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan pihak sekolah

berupaya dalam meningkatkan kualitas gurunya dengan diadakannya pengevaluasian belajar-mengajar yang diadakan disetiap rapatnya, menanyakan kepada guru apa yang menjadi kendala dan hal ini, langsung ditindak lanjuti oleh pihak sekolah dalam penanganannya. Sejauh ini guru disekolah sudah berkompeten memberikan yang terbaik kepada anak didik. Serta menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru. Dan hal ini, sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak didik yang selaku orang tua memberikan kepercayaan untuk disekolahkan di Madrasah ini. Anak didik, lebih santun ketika dirumah, pandai berbahasa arab, membaca alquran, dsb.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Diana Maya Sari, S.Pd selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H. Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa guru di sekolah berupaya dalam memberikan yang terbaik kepada siswa/siswinya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari guru. Sejauh ini, kemampuan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas dengan berdisiplin mengikuti secara prosedural peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah maupun dari pemerintah. Dan, dalam pelaksanaannya menjadi guru, banyak kendala dan hambatan yang dialami contohnya dalam hal finansial dan sarana prasarana yang diberikan pihak sekolah yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Rahmah, S.Pd selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H. Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau

mengatakan, usaha yang dilakukan oleh pihak guru yaitu memberikan yang terbaik dalam proses pengajaran kepada sisw/siswi, memberikan pelajaran sesuai dengan yang dipelajari, dan melaksanakan tugas dan fungsi guru dengan baik. Kemampuan dalam meningkatkan kualitas diri ialah, bersemangat dalam belajar-mengajar kepada siswa, menggali potensi lebih dan berupaya agar para siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi guru tentu adanya hambatan dan kendala yang dialami mulai dari finansial serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 maret 2018 pada pukul 13.30 wib dengan ibu Fitri Maria Selaku guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasata H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa. Beliau mengatakan bahwa tugas dan fungsi guru menjadi suatu usaha seorang guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar itu sendiri. Sebagaimana yang telah diutarakan bahwa menjadi guru sangat tidaklah mudah dengan berbagai tantangan yang dialaminya dan berpikir keras dalam menghasilkan anak didik yang baik. Kemampuan beliau dalam hal ini, selalu mengevaluasi diri dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan masih banyak kendala serta hambatan yang dialami contohnya finansial dan hal lainnya.

B. Analisis Data

Berdasarkan uraian penyajian data di atas, maka dalam pembahasan pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni

Tanjung Morawa . sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Madrasah ibtdaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang penyampaian Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama, maka jika dianalisis hasil wawancara tersebut, selaku ketua yayasan dan kepala sekolah MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa mengatakan bahwa jika dikaji secara konsep, implementasi kebijakan merupakan implementasi yang memiliki peraturan kebijakan yang mengatur secara keseluruhan dalam pengelolaan pendidikan agama mulai dari pihak sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki, profesionalitas para guru, dsb. Untuk penyampaian tentang peraturan tersebut seharusnya pengsosialisasian dilakukan secara maksimal untuk memahami pihak sekolah yang berbasis agama agar kegiatan atau ketentuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan agama khususnya bagi para pendidik sesuai dengan peraturan tersebut. Dan adanya peraturan ini, dapat memberikan kepada sekolah cara pengelolaan pendidikan agama yang terarah, terencana, dan berkelanjutan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara pemerintah maupun pihak sekolah dalam menyampaikan peraturan tersebut perlu adanya pembinaan

dan sosialisasi lebih agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat proses pencapaian dari kebijakan tersebut yang kemudian dapat dievaluasi dan diberi saran dan kritikan yang baik untuk kemajuan madrasah dalam pengelolaan pendidikannya.

b. Adanya tujuan yang dicapai

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa pihak sekolah menjelaskan adanya pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut dari sekolah dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan agama khususnya pada peningkatan profesionalitas guru yaitu dengan diadakannya pembuatan serta pengecekan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah dibuat oleh guru setiap semesternya demi menunjang kualitas belajar para siswa dan guru-guru tersebut turut andil dan aktif di dalam menghasilkan anak didik yang bermutu dalam pendidikan, mampu bersaing dalam pendidikan berbasis umum maupun memperdalam pendidikan agama yang telah ia dapatkan.

Kemudian, tentang bagaimana sikap para pihak sekolah dalam menekankan agar para guru semangat dalam meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru profesional yang mampu melaksanakan pembelajaran sekurang-kurangnya dengan memuat tujuan pembelajaran, memberikan materi pelajaran dengan baik, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian, serta evaluasi dan hasil belajar dari para murid. Dengan hal ini, para guru mampu untuk melaksanakan implementasi kebijakan yang telah ditentukan dan diikuti dengan berbagai perbaikan pembelajaran yang masih banyak terkendala.

c. Adanya sikap terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan

Setiap satuan pendidikan melakukan sikap sesuai dengan yang diterapkan. Sebagaimana ini, ketua yayasan dan kepala sekolah di MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa berusaha untuk memberikan sikap yang baik dan sistematis dalam menjalankan peraturan Kementrian Agama tersebut. Dengan demikian pihak sekolah harus mengikuti secara prosedural dalam pengelolaan pendidikan agama. Dan juga pelaksanaan proses harus memperhatikan kekuatan maksimal para pihak sekolah dalam menjalankan peraturan Kementrian Agama. Dengan demikian sikap dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan agama sudah sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang telah digariskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

d. Adanya guru yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan pihak sekolah beserta para guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa . sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Rahmalahati,S,Pdi selaku kepala sekolah bahwasanya guru pengajar menjadi point penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya, bagaimana guru tersebut bekerja sehingga menghasilkan anak didik yang diinginkan. Guru pengajar di sekolah sangat berusaha mungkin untuk memberikan yang terbaik. Disamping itu, banyaknya kendala menjadi faktor dalam pengembangan kualitas para guru. Hal ini, menjadi point penting bagi pihak sekolah dalam mensejahterakan gurunya agar lebih bersemangat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru yang baik. Diharapkan dukungan dari pihak sekolah juga mampu untuk membantu dan dukungan dari sekolah seperti halnya saran dan prasarana lebih memadai untuk menunjang sekolah agar dapat menjalankan kebijakan ini secara bertahap, sehingga suatu hari nanti pengelolaan pendidikan agama di MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa dapat berjalan dengan maksimal dan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa yang dilakukan sudah terlaksana, namun masih ditemukannya kendala di madrasah. Adapun kategorisasi menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu :

1. Yang pertama, adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui pihak Departemen Agama kepada pihak-pihak sekolah termasuk Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa sehingga peraturan tersebut dapat dijalankan di sekolah
2. Kedua, Adanya tujuan yang dicapai, baik pihak sekolah sendiri telah menjelaskan bahwasanya masih banyak kendala yang dialami dalam menjalankan peraturan tersebut. Dikarenakan banyak hal yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah dan guru di sekolah belum maksimal
3. Ketiga, adanya sikap terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. Sikap dari pihak sekolah mengenai peraturan ini, dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, pihak sekolah belum secara tegas memberikan sanksi kepada para pihak sekolah lainnya seperti guru dalam

ketidaksesuaian pengajaran atau pelaksanaan peraturan yang dijalankannya

4. Keempat, adanya guru yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini, para guru berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dalam pencapaian pengajarannya demi meningkatkan profesionalitas guru dan mencerdaskan anak didiknya. Dengan demikian keempat dari kategorisasi tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan Kementrian Agama NO.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dan sudah diterapkan oleh Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam implementasi Peraturan Kementrian Agama NO.16 Tahun 2010 di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa, hendaknya penyampaian kebijakan melalui Departemen Agama harus lebih disosialisasikan agar guru-guru lebih dapat memahami dari kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Pihak sekolah pun dalam hal ini turut serta dalam penyampaian peraturan tersebut kepada para guru pengajar agar dapat diterapkan di sekolah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Kepala sekolah, Kepala yayasan dan para guru/pengajar MIS H.Muhammad Hefni turut meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan

pendidikan agama, dan para wali murid pun turut mendukung dalam meningkatkan kualitas profesional guru dalam belajar-mengajar demi menghasilkan anak didik yang berkualitas baik di masyarakat, lingkungan, maupun bangsa dan negara.

3. Kemudian, pengawasan terhadap peraturan Kementrian Agama dari pemerintah melalui Departemen Agama seharusnya komite MIS H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa hendaknya mampu memberikan pengawasan lebih, atau kritik serta saran dari wakil orang tua murid demi meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan agama dan guru pengajar di madrasah tersebut.
4. Diharapkan seluruh elemen bekerjasama, baik dari pihak yayasan, para guru pengajar, orang tua wali murid, masyarakat lingkungan sekitar Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan peraturan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan agama. Dan pihak dari Departemen agama harus selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dengan sikap yang bertanggung jawab demi keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan agama yang baik dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin, 2005, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, PSAP, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Alma, Buchari, 2014. *Guru Profesional Mengusai Metode dan Terampil Mengajar*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Azwan Zain, 2010, *Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University, Press, Jakarta.
- Dye, Thomas R, 2005, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Fattah, Nanang, Dr, 2000, *Manajemen Berbasis Sekolah Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan kemandirian sekola*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung.
- Hisyam Zaini, dkk, 2002, *Strategi Pembelajaran Aktif*, CTSD IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Jamaluddin, Noor, 1978, *Pengertian Guru*, Jakarta.
- Mazmania, Daniel A dan Paul A.Sabatier, 1983. *Implementasi adn Public Policy*, Scott Foresman and Company,USA.
- Mudlofir, Ali, 2012. *Pendidik Porfesional Konsep,Strategi dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, 2004, *Paradigma Pendidikan Agama Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN, Jakarta.
- Nurdin, Muhammad, 2004. *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Primasophie, Jogjakarta.

Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.

Susilo, Hartandi, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*, Akssara Baru, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
Tachjan, Dr.H, M.si, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV.Obor Pustaka, Semarang.

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, konsep teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

----- 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

----- 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta`

Zakiah Dradjat, 1992, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Internet

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/111/jtpiain-gdl-nurjanah09-5542-1-nurjanah-1.pdf>

<http://jurnalonlinejpiips.com/tag/profesionalisme-guru/>

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Muhson/publication/296704567_Meningkatkan_Profesionalisme_Guru_Sebuah_Harapan/links/56d9b05108aee73df6cf5e98/Meningkatkan-Profesionalisme-Guru-Sebuah-Harapan.pdf

<http://www.e-journal.com/2013/12/pengertian-profesionalisme-guru.html>

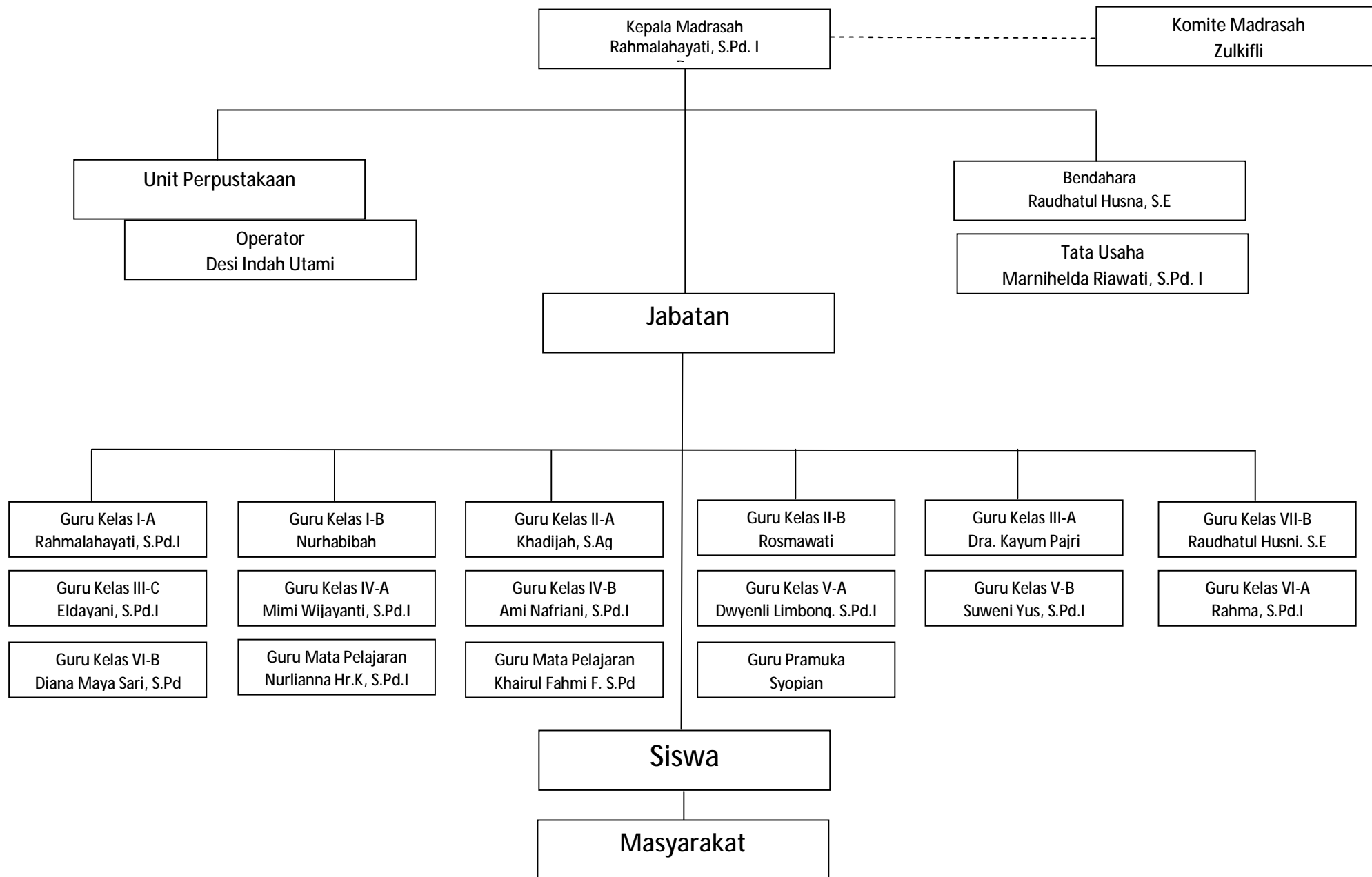
<http://www.maribelajarbk.web.id/2015/04/pengertian-profesional-profesi.html>

<http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/standar-profesionalitas-guru.html>

<http://jurnalfalasifa.files.wordpress>

<http://download.portalgaruda.org/article.php>

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH IBTIDAIYAH



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Impelementasi Kebijakan Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

Nama : Khadijah, S.Ag

Usia : 41 Tahun

Jabatan : Ketua Yayasan MIS H.Muhammad Hefni

1. Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

- a. Apakah ibu/bapak telah mengetahui mengenai Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawab : beliau mengatakan telah mengetahui tentang adanya perraturan tersebut.

- b. Bagaimana cara pihak sekolah dalam menyampaikan peraturan tersebut kepada pihak-pihak tertentu?

Jawab` : menyampaikan bahwasanya pihak sekolah menggunakan peraturan terrsebut dengan sosialisasi dan rapat dengan guru-guru serta pihak terkait

- c. Apakah pihak sekolah memiliki pedoman lain selain peraturan tersebut?

Jawab : dalam menjalankan proses belajar-mengajar dan keberlangsungan sekolah jelas ada penggunaan peraturan lain didalamnya seperti Undang-Undang tentang guru dan dosen, dsb.

2. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru telah terlaksana dengan baik?

Jawab : sejauh adanya madrasah ini, dikatakan sudah berjalan sebaik mungkin, dengan adanya usaha dari pihak sekolah dan kerja sama antar para guru dalam meningkatkan kualitas dan profesional para guru.

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawab : usaha yang dilakukan sejauh ini terhadap guru yakni guru di madrasah diwajibkan setiap orangnya membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) guru memberikan target seperti apa saja yang telah dilakukan dan pencapaian seperti apa yang telah diraih dalam meningkatkan belajar-mengajar kepada para siswa/siswi. Hal ini berlaku kepada seluruh guru, baik yang telah PNS, sertifikasi, maupun guru yang masih bersifat honorer. Dan apabila guru tersebut belum menyanggupi dalam hal pencapaian RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan diberikan sanksi berupa pengurangan gaji.

- c. Menurut bapak/ibu apa saja kendala dalam proses tindakan pengelolaan pendidikan agama disekolah?

Jawab : kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan agama yakni, ruangan kelas yang masih belum memadai untuk proses belajar-mengajar, dikarenakan setiap tahunnya siswa bertambah, dan masih terdapat guru yang belum selesai dari sarjananya sehingga adanya kendala dalam keabsenan mengajar guru tersebut.

3. Adanya Sikap Terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 mengenai profesionalitas guru?

Jawab : secara prosedural pihak sekolah mengikuti kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, selanjutnya para guru diberikan tugas untuk membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan pengontrolan terhadap pencapaian apa saja yang telah dilakukan dalam proses belajar-mengajar.

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha pihak sekolah dalam melaksanakan profesionalitas guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawab : para guru yang mengajar melaksanakannya dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah dibuat dan pihak sekolah, kemudian mendorong para guru yang mampu atau belum mampu untuk keikutsertaan dalam sertifikasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah

- c. Menurut bapak/ibu tindakan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap guru yang belum memenuhi syarat secara administratif disekolah?

Jawab : guru yang belum memenuhi syarat dari peraturan Kementerian Agama tersebut dibina proses belajar-mengajar yang beliau terapkan dalam kelas dan tidak diberikan penanganan kepada kelas kelas yang tinggi pelajarannya seperti kelas 4,5 dan 6.

4. Adanya Guru yang Berkompeten Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana cara pihak sekolah menilai kualitas guru yang mengajar disekolah MIS H.Muhammad Hefni?

Jawab : sesuai RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dalam penilaiannya apabila seorang guru telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuatnya disinilah pihak sekolah melakukan penilaian kinerja guru, pihak sekolah menilai akhir kinerja yang dihasilkan kemudian menjadi kategori penilaian dan digunakan untuk menentukan persentase kualitas seorang guru yang mengajar

- b. Menurut bapak/ibu apakah guru yang berada disekolah sudah berkompeten dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik?

Jawab : para guru yang berada disekolah berupaya dalam menjalankan peran dan fungsinya, mengajar dengan baik, memberikan tauladan yang baik kepada peserta didiknya, serta memberikan motivasi belajar

- c. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi hambatan dan kendala guru dalam proses belajar-mengajar disekolah?

Jawab : banyaknya kendala dan hambatan masih adanya sarana dan prasarana yang kurang, lemahnya dalam faktor keuangan sekolah,

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Impelementasi Kebijakan Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

Nama : Rahmalahayati,S.Pd

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Kepala Yayasan MIS H.Muhammad Hefni

1.Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

- a. Apakah ibu/bapak telah mengetahui mengenai Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawab : beliau mengatakan telah mengetahui tentang adanya perraturan tersebut.

Bagaimana cara pihak sekolah dalam menyampaikan peraturan tersebut kepada pihak-pihak tertentu?

Jawab` : beliau menyampaikan pihak sekolah menggunakan peraturan terrsebut dengan sosialisasi yang pernah diadakan oleh pihak Dapertemen Agama dan kemudian pihak sekolah menyampaikan ketika rapat kepada dewan guru

- b. Apakah pihak sekolah memiliki pedoman lain selain peraturan tersebut?

Jawab : dalam menjalankan proses belajar-mengajar dan keberlangsungan sekolah jelas ada penggunaan peraturan lain didalamnya seperti Undang-Undang tentang guru dan dosen, dsb.

2. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a. Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru telah terlaksana dengan baik?

Jawab : sejauh adanya madrasah ini, dikatakan sudah berjalan baik tentu baik. Akan tetapi disisi yang lain banyak kekurangan yang dihadapi

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawab : usaha yang dilakukan sejauh ini terhadap guru yakni kami setiap tahunnya berusaha menghadirkan guru-guru yang memang berkompeten dalam bidangnya, apa saja kemampuan yang dimiliki dan bidang apa yang dikuasainya sesuai dengan sarjana apa yang ia miliki. Dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru tersebut baik di lingkungan sekolah maupun pelatihan diluar sekolah yang bersifat resmi demi meningkatkan kualitasnya sebagai guru. Dan wajib kepada guru untuk membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

- c. Menurut bapak/ibu apa saja kendala dalam proses tindakan pengelolaan pendidikan agama disekolah?

Jawab : kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan agama yakni, ruangan kelas yang masih belum memadai untuk proses belajar-mengajar, dikarenakan setiap tahunnya siswa bertambah, dan masih terdapat guru yang belum selesai dari sarjananya sehingga adanya kendala dalam keabsenan mengajar guru tersebut.

3. Adanya Sikap Terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 mengenai profesionalitas guru?

Jawab : langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pprrofesionalitas guru yakni berusaha menjadikan guru guru di madrasah sebagai guru yang profesional, memberikan pelatihan untuk pengembangan guru, dan pengontrolan terhadap pencapaian apa saja yang telah dilakukan dalam proses belajar-mengajar.

- b. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha pihak sekolah dalam melaksanakan profesionalitas guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawab : usaha yang dilakukan sejauh ini terhadap guru yakni kami setiap tahunnya berusaha menghadirkan guru-guru yang memang berkompeten dalam bidangnya, apa saja kemampuan yang dimiliki dan bidang apa yang dikuasainya sesuai dengan sarjana apa yang ia miliki. Dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru tersebut baik di lingkungan sekolah maupun pelatihan diluar sekolah yang bersifat resmi demi meningkatkan kualitasnya sebagai guru. Dan wajib kepada guru untuk membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

- c. Menurut bapak/ibu tindakan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap guru yang belum memenuhi syarat secara administratif disekolah?

Jawab : pihak sekolah berupaya memebrikan motivasi kepada guru tersbut. Dan guru tersebut, dianjurkan untuk menempuh pendidikan S1 demi meningkatkan profesioanlitas guru dan untuk memenuhi syarat guru sebagaimana petaturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama.

4. Adanya Guru yang Berkompeten Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana cara pihak sekolah menilai kualitas guru yang mengajar disekolah MIS H.Muhammad Hefni?

Jawab : cara pihak sekolah menilai guru profesional yakni dengan bagaimana tahapan yang baik dalam belajar-mengajar yang para guru sampaikan kepada anak didiknya, pelaksanaan belajar mengajar sesuai dengan RPP (Renacana Pelaksanaan Pembelajaran), adanya guru yang bersertifikasi.

- b. Menurut bapak/ibu apakah guru yang berada disekolah sudah berkompeten dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik?

Jawab : guru yang mengajar berusaha untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru.

- c. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi hambatan dan kendala guru dalam proses belajar-mengajar disekolah?

Jawab : proses-belajar tentu adanya berbagai hambatan dan kendala salah satunya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Impelementasi Kebijakan Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

Nama : Zulkifli

Usia : 39 Tahun

Jabatan : Ketua Komite MIS H.Muhammad Hefni

1. Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

- a. Apakah ibu/bapak telah mengetahui mengenai Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawab : ya saya mengetahuinya.

- b. Bagaimana yang bapak/ibu ketahu cara pihak sekolah menyampaikan Peratuan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : melalui rapat dengan guru-guru seokolah

- c. Apakah bapak/ibu ketahu pihak sekolah telah mengacu dalam pelaksanaan Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawaban : iya, pihak sekolah telah mengacu pada peraturan tersebut.

2. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a.** Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru telah terlaksana dengan baik?

Jawaban: pihak sekolah berupaya semampunya, mungkin di sana sini masih terdapat kekurangan.

- b.** Menurut bapak/ibu apakah pengelolaan pendidikan agama telah sesuai dengan yang dijalankan oleh pihak sekolah?

Jawaban : iya, telah sesuai

- c.** Menurut bapak/ibu ketahuilah sejauhmana tingkat profesionalitas tenaga pendidik disekolah?

Jawaban : sejauh ini yang saya perhatikan pihak sekolah berusaha dan banyak kendala yang dialami dalam meningkatkan kualitas pengajaran terutama pada guru-gurunya.

3. Adanya Sikap Terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

- a.** Menurut bapak/ibu ketahui langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 mengenai profesionalitas guru?

Jawaban : yang saya ketahui melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh luar dari pihak sekolah.

- b.** Menurut bapak/ibu ketahui bagaimana usaha pihak sekolah dalam melaksanakan profesionalitas guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : usahanya menyeleksi guru-guru sesuai pada bidang bidangnya.

- c.** Menurut bapak/ibu apa saran bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama khususnya bagi tenaga pengajar?

Jawaban : saran saya bagi madrasah mungkin agar lebih efektif lagi dalam menjalan peraturan tersebut demi berjalannya madrasah dengan baik.

4. Adanya Guru yang Berkompeten Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana cara pihak sekolah menilai kualitas guru yang mengajar disekolah MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : saya kurang tahu, apakah dengan adanya seleksi apa adanya penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menilai kualitas guru.

- b. Menurut bapak/ibu apakah guru yang berada disekolah sudah berkompeten dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik?

Jawaban : sejauh ini mereka berusaha dalam menjalankan tugas tugasnya.

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana pengaruh yang didapat siswa/siswi dari kualitas pendidikan agama serta profesionalitas guru disekolah?

Jawaban : pengaruh yang didapat terhadap anak, khususnya pada anak saya alhamdulillah anak saya menjadi baik budinya di rumah, selalu patuh pada orang tua.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Impelementasi Kebijakan Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

Nama : Diana Maya Sari,S.Pd

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Guru Pengajar MIS H.Muhammad Hefni

C. Guru di MIS H.Muhammad Hefni

1. Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

- a. Apakah ibu/bapak telah mengetahui mengenai Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawaban : insyallah saya mengetahuinya.

- b. Bagaimana menurut bapak/ibu pihak sekolah dalam menyampaikan Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : adanya sosialiasi yang diberikan oleh anggota dari kantor Dapartemen Agama akan hal ini, kemndian pihak sekolah menyampaikan kepada guru pada saat adanya rapat.

- c. Bagaimana bapak/ibu ketahui pihak sekolah melaksnakan pelaksanaan Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru?

Jawaban : yang saya rasakan pihak sekolah berusaha dalam meningkatkan guru dalam proses belajar-mengajarnya sesuai dengan bidang-bidangnya dan kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada guru.

2. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a.** Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru telah terlaksana dengan baik?

Jawaban : sejauh ini, pihak sekolah berupaya menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

- b.** Bagaimana bapak/ibu dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : adanya peraturan tersebut selaku guru saya berupaya memberikan yang terbaik kepada sekolah, menjalankan secara prosedural dalam menjalankan pengelolaan pendidikan agama.

- c.** Apa saja hambatan dan kendala yang bapak/ibu rasakan dalam meningkatkan profesionalitas guru disekolah?

jawaban : banyak hambatan dan kendala dalam menjalankannya seperti kurangnya sarana dan prasarana, dsb.

3. Adanya Sikap Terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha dalam mendidik para siswa/siswi disekolah?

Jawaban : banyak usaha dalam mendidik siwa/siswi yang berada disekolah contohnya dengan memberikan tauladan yang baik kepada mereka, berdisiplin dalam belajar-mengajar, dsb.

- b. Menurut bapak/ibu ketahui bagaimana yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik yang baik?

Jawaban : saya sendiri mengikuti sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang wajib dibuat serta dilaksanaka oleh guru yang mengajar.

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap dari pihak sekolah dalam kepada bapak/ibu dalam menajalankan profesi sebagai guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : sejauh ini yang saya rasakan pihak sekolah kepada para guru memberikan motivasi dalam pengajarannya dan pihak sekolah memberikan kemudahan kepada guru untuk melaksanakan proses belajar-mengajar yang baik.

4. Adanya Guru yang Berkompeten Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha bapak/ibu dalam meningkatkan kualitas sebagai pendidik?

Jawaban : sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa guru disekolah berupaya dalam memberikan yang terbaik kepada siswa/siswinya melaksanakan tugs sesuai dengan tugas dan fungsi dari guru

- b. Menurut bapak/ibu sejauhmana kemampuan bapak/ibu dalam meningkatkan kualitas profesionalitas sebagai pendidik?

\Jawaban : yang berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas keproseionalan saya dengan berdisipin mengikuti secara prosedural peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah maupun dari pemerintah.

- c. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam meningkatkan kualiatas sebagai pendidik di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : banyak kendala dan hambatan yang dialami conntohnya dalam hal financial dan sarana prasarana yang diberikan pihak sekolah yang belum memadai.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Impelementasi Kebijakan Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa.

Nama : Rahmah, S.Pdi

Usia : 31 Tahun

Jabatan : Guru Pengajar MIS H.Muhammad Hefni

1. Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

- a. Apakah ibu/bapak telah mengetahui mengenai Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawaban : insyallah saya mengetahuinya.

- b. Bagaimana menurut bapak/ibu pihak sekolah dalam menyampaikan Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : adanya sosialisasi yang diberikan oleh anggota dari kantor Dapartemen Agama akan hal ini, dan kemndian disampaikan kepada gur pada saat adanya rapat.

- c. Bagaimana bapak/ibu ketahui pihak sekolah melaksnakan pelaksanaan Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru?

Jawaban : yang saya rasakan pihak sekolah berusaha dalam meningkatkan guru dalam proses belajar-mengajarnya sesuai dengan bidang-bidangnya dan kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada guru.

2. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a.** Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru telah terlaksana dengan baik?

Jawaban : sejauh ini pihak sekolah berupaya dalam menjalankannya dengan baik

- b.** Bagaimana bapak/ibu dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : selaku guru saya wajib menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkhususnya peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah sesuai dengan peraturan tersebut.

- c.** Apa saja hambatan dan kendala yang bapak/ibu rasakan dalam meningkatkan profesionalitas guru disekolah?

Jawaban : banyak kendala dalam proses-belajar mengajar seperti sarana dan prasana yang belum memadai.

3. Adanya Sikap Terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

- a.** Menurut bapak/ibu bagaimana usaha dalam mendidik para siswa/siswi disekolah?

Jawaban : Beliau mengatakan usaha dalam mendidik para siswa/siswi dengan menjadi murid yang baik, berkahlakul karimah, dan selalu memberikan motivasi belajar kepada anak didik sehingga mereka menjadi anak didik yang bermanfaat bagi masyarakat.

- b.** Menurut bapak/ibu ketahui bagaimana yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik yang baik?

Jawaban : saya membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang wajib dibuat serta dilaksanakan dan ini sangat efisien dalam belajar-mengajar dan menjalankan peraturan sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak sekolah

- c.** Menurut bapak/ibu bagaimana sikap dari pihak sekolah dalam kepada bapak/ibu dalam menajalankan profesi sebagai guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : dari kepala sekolah maupun yayasan memberikan motivasi dalam prose belajar-mengajar dan memberikan kemudahan kepada guru untuk melaksanakan proses belajar-mengajar yang baik.

4. Adanya Guru yang Berkompeten Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha bapak/ibu dalam meningkatkan kualitas sebagai pendidik?

Jawaban : usaha yang saya lakukan yaitu memberikan yang terbaik dalam proses penagjaran kepada sisw/siswi, memberikan pelajaran sesuai dengan yang dipelajari, dan melaksanakan tugas dan fungsi guru dengan baik.

- b. Menurut bapak/ibu sejauhmana kemampuan bapak/ibu dalam meningkatkan kualitas profesionalitas sebagai pendidik?

Jawaban : Kemampuan saya dalam meningkatkan kualitas diri ialah, bersemangat dalam belajar-mengajar kepada siswa, menggali potensi lebih dan berupaya agar para siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan.

- c. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam meningkatkan kualitas sebagai pendidik di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : banyak dari keuangan sekolah yang masih banyak yang kurang untuk keperluan di sekolah.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Impelementasi Kebijakan Peraturan Kementrian Agama No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta H.Muhammad Hefni Tanjung Morawa,

Nama : Fitri Maria

Usia : 22 Tahun

Jabatan : Guru Pengajar MIS H.Muhammad Hefni

C. Guru di MIS H.Muhammad Hefni

1. Adanya Proses Penyampaian Informasi Kebijakan dari Pembuat Kebijakan Kepada Pelaksana Kebijakan

- a. Apakah ibu/bapak telah mengetahui mengenai Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama?

Jawaban : belum sepenuhnya mengetahui isi peraturan Kemnetrian Agama tersebut. Akan tetapi pernah mendengar dari rapat-rapat yang diadakan oleh pihak sekolah.

- b. Bagaimana menurut bapak/ibu pihak sekolah dalam menyampaikan Peraturan Kementrian Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : dengan rapat guru.

- c. Bagaimana bapak/ibu ketahui pihak sekolah melaksnakan pelaksanaan Peraturan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru?

Jawaban : yang saya rasakan pihak sekolah berusaha dalam meningkatkan kualitas guru akan tetapi banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah.

2. Adanya Tujuan yang Dicapai

- a.** Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dalam meningkatkan profesionalitas guru telah terlaksana dengan baik?

Jawaban : menjalankannya dengan baik.

- b.** Bagaimana bapak/ibu dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama disekolah?

Jawaban : memberikan pengajaran yang terbaik kepada siswa/siswi

- c.** Apa saja hambatan dan kendala yang bapak/ibu rasakan dalam meningkatkan profesionalitas guru disekolah?

jawaban : sarana yang belum memadai, dan saya menyadari akan banyaknya target yang belum tercapai.

3. Adanya Sikap Terhadap Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha dalam mendidik para siswa/siswi disekolah?

Jawaban : saya berusaha menjadi guru yang berkualitas dan itu tidaklah mudah diikuti dengan pengalaman yang belum lama dan ini sangat berpengaruh kepada siswa/siswi serta memberikan tauladan yang baik kepada mereka, memberikan motivasi dalam belajar,dan menjadikan mereka anak-anak yang berakhlakul karimah,

- b. Menurut bapak/ibu ketahui bagaimana usaha yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik yang baik?

Jawaban : tentunya dengan mengikuti peraturan yang diberikan oleh sekoah maupun peraturan dari pemerintah

- c. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap dari pihak sekolah dalam kepada bapak/ibu dalam menajalankan profesi sebagai guru di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : yang saya rasakan pihak sekolah memberikan motivasi kepada para guru untuk bersaing memberikan yang terbaik bagi sekolah maupun peserta didiknya.

4. Adanya Guru yang Berkompeten Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana usaha bapak/ibu dalam meningkatkan kualitas sebagai pendidik?

Jawaban : tugas dan fungsi guru menjadi suatu usaha seorang guru dalam melaksanakan proses belajar-menagajar itu sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya menjadi guru sangat tidaklah mudah dengan berbagai tantangan yang dialaminya dan berbikir keras dalam menghasilkan anak didik yang baik.

- b. Menurut bapak/ibu sejauhmana kemampuan bapak/ibu dalam meningkatkan kualitas profesionalitas sebagai pendidik?

Jawaban : selalu mengevaluasi diri dalam menjalankan tugasnya sebagai guru.

- c. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam meningkatkan kualiatas sebagai pendidik di MIS H.Muhammad Hefni?

Jawaban : masih banyak kendala serta hambatan yang dialami contohnya finansial dan hal lainnya.